

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### 2.1. Kerangka Teori

Hubungan manusia dengan alam adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebagai satu kesatuan, semua hal tersebut saling berkaitan dan bersifat fungsional. Alam sebagai satu kesatuan sistem yang utuh merupakan kolektivitas dari serangkaian subsistem yang saling berhubungan, bergantung, dan fungsional satu sama lain. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, dalam hal ini sungai dan bantarnya. Ekosistem terbentuk oleh komponen hidup dan tak hidup, yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur (Odum, 1971).

Manusia hidup dari unsur-unsur lingkungan hidupnya. Udara untuk pernafasan, air untuk minum, keperluan rumah tangga dan kebutuhan lain, tumbuhan dan hewan untuk makanan, tenaga dan kesenangan, serta lahan untuk tempat tinggal dan produksi pertanian. Manusia adalah bagian integral lingkungan hidupnya. Ia tak dapat dipisahkan dari padanya. Manusia tanpa lingkungan hidupnya adalah suatu abstraksi belaka. (Soemarwoto, 2001).

Aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup merupakan keterkaitan dan tidak boleh dipisahkan (dipertentangkan) satu sama lain. Dalam agenda utama pembangunan berkelanjutan, dengan menggeser titik berat pembangunan ekonomi juga mencakup pembangunan sosial budaya dan lingkungan hidup. Pengertian lainnya adalah sebuah integrasi pembangunan sosial budaya dan pembangunan lingkungan hidup ke dalam arus utama pembangunan nasional. Tujuannya adalah agar kedua aspek tersebut mendapat perhatian yang sama bobotnya dengan aspek ekonomi (Keraf, 2002).

Sungai sejak awal perkembangan manusia menjadi unsur alam yang sangat berperan di dalam membentuk corak kebudayaan suatu bangsa. Ketersediaan airnya, lembahnya yang subur, dan lain-lain potensinya menarik manusia untuk bermukim di sekitarnya.

Kehidupan sehari-hari mereka tidak akan lepas dari memanfaatkan sungai dengan konsekuensi manusia akan melakukan rekayasa terhadapnya yang perlu untuk lebih banyak dapat mengambil manfaat darinya. Manusia harus melakukannya secara bersahabat, agar tidak timbul dampak yang merugikan. Sebagai unsur-unsur alam, segala tindakan terhadapnya akan menimbulkan dampak perubahan sifat dan keadaannya sebagai penyesuaian terhadap perlakuan apa yang diterimanya (Mulyanto 2007). Sementara itu kualitas manusia dan kualitas lingkungan dapat mempengaruhi hubungan antara manusia dengan lingkungannya (Meadows dalam Soetaryono, 1998)

Selama ini sungai telah menjadi tempat yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sungai-sungai di Indonesia 30 tahun terakhir ini mengalami peningkatan pembangunan fisik yang relatif cepat. Pembangunan fisik tersebut seperti pembuatan sudetan, pelurusan, pembuatan tanggul sisi, pembetonan tebing baik pada sungai besar maupun kecil (Maryono, 2004). Pembangunan fisik sungai tidak saja merubah badan sungai, namun juga kondisi sempadan sungai. Sempadan sungai sering juga disebut dengan bantaran sungai. Namun, sebenarnya ada sedikit perbedaan, karena bantaran sungai adalah daerah pinggir sungai yang tergenangi air saat banjir (*flood plain*). Bantaran sungai disebut juga bantaran banjir. Sempadan sungai adalah daerah bantaran banjir ditambah lebar longsoran tebing sungai (*sliding*) yang mungkin terjadi, lebar bantaran ekologis, dan lebar keamanan yang diperlukan terkait dengan letak sungai (misal, areal permukiman dan non permukiman) (Maryono, 2004). Definisi lain menyebutkan bahwa daerah sempadan adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.63/PRT/1993).

Sempadan sungai (terutama di daerah bantaran banjir) adalah daerah ekologi sekaligus hidraulik sungai yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dengan badan sungai. Secara hidraulis dan ekologis, sempadan sungai merupakan satu kesatuan baik secara lateral maupun sepanjang alur sungai. Dilihat dari segi *hidraulis-morfologis*, sempadan sungai memiliki fungsi antara lain sebagai berikut (Maryono, 2004):

1. Memperbesar infiltrasi air limpasan
2. Dengan adanya sempadan, limpasan air hujan yang berasal dari daratan sebelum sampai ke sungai akan tertampung, kemudian diresapkan ke dalam tanah. Semakin banyak air yang terinfiltrasi maka kandungan air tanah (*ground water*) akan semakin besar.
3. Memelihara aliran dasar sungai
4. Sempadan sungai adalah daerah tata air sungai yang terdapat mekanisme *inflow* ke sungai dan *outflow* ke air tanah. Proses *inflow-outflow* tersebut merupakan proses konservasi hidrolis sungai dan air tanah pada umumnya.
5. Melindungi tebing sungai dari pengikisan dan erosi
6. Secara hidraulis sempadan sungai merupakan daerah bantaran banjir yang berfungsi memberikan kemungkinan luapan air banjir ke samping kanan kiri sungai sehingga kecepatan air ke hilir dapat dikurangi, energi air dapat diredam di sepanjang sungai, serta erosi tebing dan erosi dasar sungai dapat dikurangi secara simultan. Di samping itu, akar-akar pohon/vegetasi dapat mengkonsolidasi tanah bantaran banjir dan tebing sungai, sehingga mengurangi potensi erosi tebing.
7. Memberikan ruang bagi sungai untuk bergerak secara lateral
8. Tidak jarang alur sungai berpindah atau melebar seiring dengan berjalannya waktu, dengan demikian sempadan memberikan perlindungan baik untuk sungai itu sendiri maupun lahan di sekitarnya.
9. Memberikan perlindungan dari banjir
10. Pengendali banjir yang menelan biaya besar tidak diperlukan jika desain sempadan memperhitungkan banjir kala ulang 100 tahunan.
11. Memungkinkan untuk restorasi di masa yang akan datang.
12. Mempertahankan kualitas habitat ikan dan organisme akuatik lainnya dengan mekanisme sebagai berikut:
13. Memberikan naungan dan mempertahankan suhu air sungai pada suhu optimal.
14. Menyediakan variasi habitat.
15. Menyediakan tempat perlindungan

16. Sebagai sumber bahan organik (serasah daun, ranting, dan kayu mati)
17. Sebagai elemen estetika koridor sungai

### **2.1.1. Makna dan Praktek Pengelolaan Sungai**

Makna berarti arti, maksud, dan tujuan. Makna adalah pengertian dasar yang diberikan atau yang ada dalam suatu hal. Arti adalah apa yang terkandung dalam suatu atau guna dari sesuatu. Maksud adalah niat atau kehendak seseorang untuk mendasari perbuatannya. Tujuan adalah sesuatu yang dituju. Praktek adalah pelaksanaan dari teori atau makna secara nyata. (Salim, 1995). Makna sungai adalah arti sungai yang diberikan kepada masyarakat sempadan yang bermukim disekitarnya. Makna terhadap sungai ini yang mendasari perbuatan atau praktek terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sungai.

Sungai memiliki makna yang sangat tinggi di dalam suatu masyarakat dengan nilai-nilai tertentu dan berfungsi sebagai sumberdaya. Kata nilai (*value*) diambil dari istilah latin *valere*, yang berarti menjadi kuat atau patut. Di dalam masyarakat yang mengkramatkan air, nilai air terletak pada peranan dan fungsinya sebagai kekuatan hidup bagi binatang, tanaman, dan ekosistem. Namun komodifikasi air telah menurunkan nilainya menjadi sekedar nilai komersial. Sumberdaya (*resource*) juga memiliki akar yang menarik. Istilah ini berasal dari kata surge yang berarti memiliki kapasitas untuk bangkit kembali. Istilah tersebut sekarang berarti sesuatu yang memperoleh nilainya sebagai bahan mentah untuk industri. Sumberdaya acapkali bisa bernilai tinggi tetapi tanpa memiliki harga. Situs-situs suci seperti hutan dan sungai yang dianggap suci, adalah contoh sumberdaya yang bernilai tinggi tapi tidak berharga secara ekonomi (Siva, 2002).

Pada kebudayaan Jawa terdapat makna tentang asal-usul serta hakekat dari alam semesta, manusia serta alam. Secara kosmologi di dunia merupakan bagian dari kesatuan keadaan yang meliputi segalanya. Dalam satuan itu, semua gejala mempunyai tempat dan berada dalam hubungan-hubungan yang saling melengkapi dan

terkoordinasi satu dengan yang lainnya. Menurut Kosmologi Jawa, alam semesta termasuk sungai di dalamnya dilihat sebagai bejana dengan batas dan ukuran yang tetap (Budhisantoso, 1995). Pusat dari alam semesta adalah Sang Hyang Tunggal atau mahluk yang paling berkuasa. Isi dari alam semesta selalu berpindah dari satu keteraturan ke keteraturan yang lain dan di antara keduanya ada kondisi ketidakteraturan (Suparlan, 1986)

Manusia mempunyai makna mengenai lingkungan hidupnya. Makna mengenai lingkungan hidupnya diperoleh dari hasil interaksi dengan lingkungannya secara terus-menerus. Makna tentang lingkungan ini merupakan gambaran struktur kehidupan, bagaimana lingkungan itu berfungsi dan berhubungan dengan tindakan manusia terhadap lingkungan hidupnya. Makna terhadap lingkungan memberi petunjuk apa yang dapat diperoleh manusia terhadap lingkungannya, termasuk juga hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Masyarakat Jawa juga mempunyai makna-makna lingkungan yang terselubung oleh mistik seperti tempat tertentu yaitu, sumber air, hutan, pohon-pohon tertentu ada penunggunya dan dikeramatkan. Pengkramatan tersebut membawa implikasi positif untuk melindungi sumberdaya (Triharso, 1983). Pengetahuan yang telah hidup dan berkembang untuk mengelola lingkungan secara tradisional adalah pengetahuan lokal atau yang merupakan kemampuan dari komunitas tertentu dalam menciptakan aturan, nilai dan pranata sosialnya untuk menjaga keserasian atau kelestarian fungsi lingkungannya (Geertz, 1983).

Lingkungan hidup sudah sepentasnya mendapat perhatian penting, karena kualitas hidup setiap orang pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan hidup dimana individu tersebut berada. Masalah lingkungan tidak hanya berpengaruh terhadap mahluk hidup, kesehatan fisik atau kematian seseorang, tetapi juga terhadap kesehatan mental dan masalah-masalah emosional manusia. Lingkungan permukiman yang terlalu padat, jorok dan kumuh sangat berpengaruh terhadap kerawanan sosial, konflik antara individu dan tentu saja degradasi lingkungan itu sendiri (Kementerian Lingkungan Hidup, 2002).

Strategi pengelolaan sumberdaya air harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan fungsi dari air yaitu fungsi ekonomi, ekologi dan sosial. Pengelolaan sumberdaya air juga perlu difokuskan pada kualitas air yang layak untuk dimanfaatkan di berbagai keperluan, terutama dalam memenuhi air bersih bagi masyarakat. Bagi penduduk yang tinggal di perkotaan terutama golongan ekonomi lemah, masalah akses terhadap air yang aman dikonsumsi telah menjadi beban sehari-hari yang berkontribusi terhadap menurunnya kualitas hidup mereka (Kementerian Lingkungan Hidup, 1997).

Pertumbuhan jumlah penduduk di kawasan perkotaan, baik karena pertumbuhan alami maupun oleh migrasi, hampir identik dengan pertumbuhan permintaan terhadap pangan, air bersih, dan permukiman. Pada saat yang bersamaan penambahan penduduk tersebut juga memiliki implikasi terhadap kualitas udara, air, dan tanah. Pertumbuhan penduduk dalam hal ini merupakan faktor *esensial*, bahkan dominan, bagi terjadinya degradasi lingkungan (Bilsborrow, 1992).

Sumber air dan aliran sungai adalah sumberdaya yang terbentang dari hulu sampai ke hilir dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang berada di sisi kanan dan kiri sungai. Sumber daya seperti ini dapat dibedakan ke dalam dua kategori yaitu: *open acces resource* dan *communally owned resource*. Kategori pertama mencakup sumberdaya yang dapat diakses oleh semua orang tanpa kecuali dan tanpa batasan, karena pada sumberdaya itu dipandang belum melekat suatu hak tertentu dari suatu komunitas atau pun negara. Kategori kedua adalah sumberdaya yang dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau kelompok sosial tertentu. Dengan demikian cara-cara pemanfaatan sumberdaya tersebut telah diatur oleh lembaga yang dibangun dan dikukuhkan oleh komunitas atau kelompok sosial tadi. Kelompok-kelompok adat yang selama ini memiliki berbagai nilai dan norma sosial yang telah berjalan selama ratusan tahun masih ada yang mampu untuk mengelola sumberdaya bersama tanpa merusaknya. Mereka menjalankan semua aturan dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal di dalam anggota masyarakat adat yang mengelola sumber daya alam ini (Acheson, 1989).

Sumberdaya dengan kategori pertama mempunyai persoalan lingkungan seperti pencemaran sungai baik dari limbah padat maupun limbah cair. Posisi sungai yang terbagi ke dalam wilayah hulu yang berada di daerah pegunungan biasanya terdapat di daerah pedesaan. Sungai Code membelah kota Yogyakarta sehingga tingkat pencemarannya juga lebih tinggi. Bagian hulu adalah daerah pedesaan yang juga dimanfaatkan untuk pengairan baik sawah maupun kegiatan perikanan. Pengelolaan sungai antara bagian hulu, tengah dan hilir saling berhubungan terutama kegiatan yang dilakukan pada bagian hulu akan berpengaruh pada kualitas air di bagian tengah dan hilir. Sementara itu kategori kedua merupakan sumberdaya yang dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau kelompok sosial tertentu. Dengan demikian cara memanfaatkan sumberdaya itu telah diatur oleh suatu lembaga pengelolaan yang dibangun dan dikukuhkan oleh komunitas atau kelompok sosial (Acheson, 1989).

### **2.1.2. Sejarah Kawasan Permukiman Perkotaan**

Komunitas masyarakat di sempadan Sungai Code tidak bisa dipisahkan dari berdirinya Kota Yogyakarta. Diawali dengan adanya Perjanjian Gianti pada tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani oleh wakil dari Kompeni Belanda, yaitu Gubernur Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jendral Jacob Mossel. Isi Perjanjian Gianti menyebutkan, Negara Mataram dibagi menjadi dua. Setengah bagian menjadi hak Kerajaan Surakarta, sedangkan sisanya menjadi hak Pangeran Mangkubumi. Di dalam perjanjian, Pangeran Mangkubumi diakui sebagai raja dari setengah daerah pedalaman Kerajaan Jawa dengan Gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah. Setelah perjanjian pembagian daerah itu selesai, Pangeran Mangkubumi yang sering disebut sebagai Sultan Hamengku Buwono I segera menetapkan bahwa Daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat yang beribukota di Ngayogyakarta (Suryo, 2004).

Di wilayah Ibukota Ngayogyakarta terdapat dua sungai besar, yaitu Sungai Winongo dan Sungai Code. Ke dua sungai ini terdapat pada dua sisi keraton dan menembus ibu

kota dari arah utara ke selatan. Selain berfungsi sebagai tempat pembuangan air yang cukup besar dari seluruh kota, kedua sungai juga dimanfaatkan untuk menghindari wilayah ibu kota dari bencana banjir. Aspek strategis pembangunan keraton pada masa lalu menunjukkan bahwa Sungai Code dan Sungai Winongo merupakan lingkaran pertahanan tingkat kedua setelah setelah istana dan benteng sebagai pertahanan utama dan pertama (Panitia 200 tahun peringatan Kota Yogyakarta, 1956).

Pengaturan tata kota Yogyakarta ini tidak lepas dari rancangan Sri Sultan Hamengku Buwono I untuk membangun sumbu imajiner dengan membangun Istana dengan Alun-alun di bagian Utara dan Selatan. Bangunan Istana ini dibatasi oleh bangunan benteng yang mengelilingi istana. Dibangun juga tugu yang dikenal sebagai *palputih* atau *golong gilik* yang merupakan batas ibukota sebelah utara, serta panggung berburu di Desa Krapyak yang menghadap Parangkusuma di pesisir Laut Selatan. Garis lurus yang menghubungkan Panggung Krapyak, Istana dan Tugu merupakan awal arah pertumbuhan kota yang kemudian diikuti oleh arah timur barat ketika jaringan transportasi berkembang pada abad 19 (Soemarwoto, 2001).

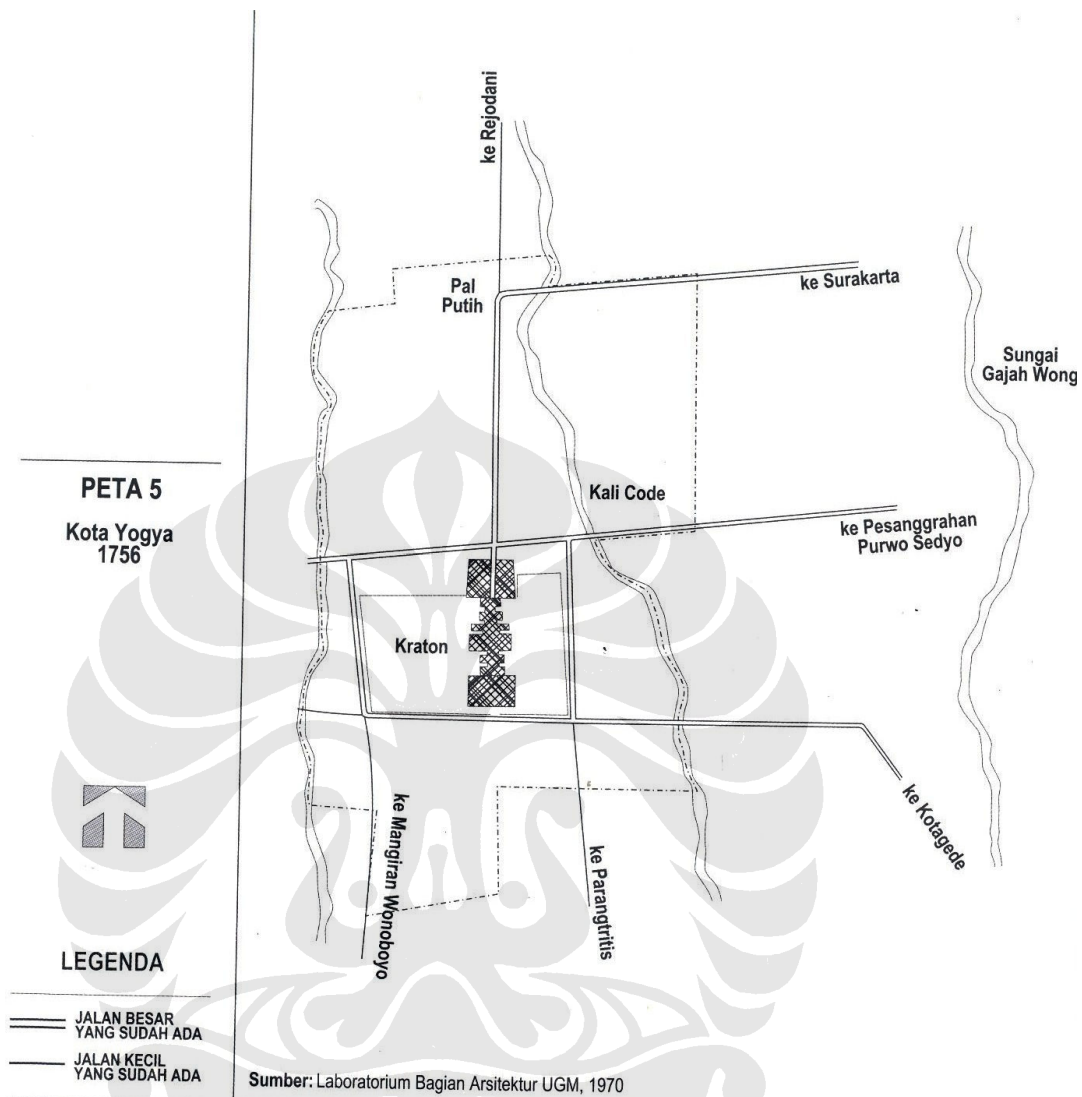
Keraton, atau sebutan untuk istana di daerah itu, merupakan pusat kota yang dikelilingi oleh bangunan benteng yang sekarang dikenal dengan nama *Jeron Beteng*, yang artinya “di dalam benteng”. Daerah di dalam benteng mempunyai berbagai fasilitas istana seperti Alun-alun, Pagelaran, dan juga tempat tinggal raja. Sebagian kerabat raja juga tinggal di kawasan *Jeron Beteng*. Kerabat raja yang tinggal di kawasan *Jeron Beteng* ditempatkan di Kampung Suryodiningratan, Kampung Joyokusuman, dan Kampung Panembagan, dimana nama-nama kampung ini diambil dari nama pangeran yang berada di masing-masing wilayah tersebut (Surjomihardjo, 2000).

Selain kampung-kampung yang ditempati kerabat raja tersebut, di kawasan *Jeron Beteng* terdapat pula kampung-kampung lain dengan spesifikasi penghuni yang berbeda. Kampung Kemitbumen, yaitu tempat tinggal abdi dalem kemit bumi yang bertugas sebagai pembersih keraton; Kampung Siliran, yaitu tempat tinggal abdi dalem



silir, yang bertugas mengurus lampu penerangan keraton; Kampung Nagan, yaitu tempat tinggal abdi dalem yang bertugas mengurus kuda kraton, Kampung Pesidenan; yaitu tempat tinggal abdi dalem yang bertugas untuk menembangkan tembang-tembang Jawa dalam acara-acara dan upacara keraton; Kampung Patehan, yaitu tempat tinggal abdi dalem yang bertugas menyediakan minuman di kraton; Kampung Gamelan, yaitu tempat tinggal abdi dalem yang bertugas sebagai penabuh gamelan Jawa; Kampung Suranatan, yaitu tempat tinggal abdi dalem yang bertugas dalam bidang keagamaan sebagai ulama keraton (Suryo, 2004).

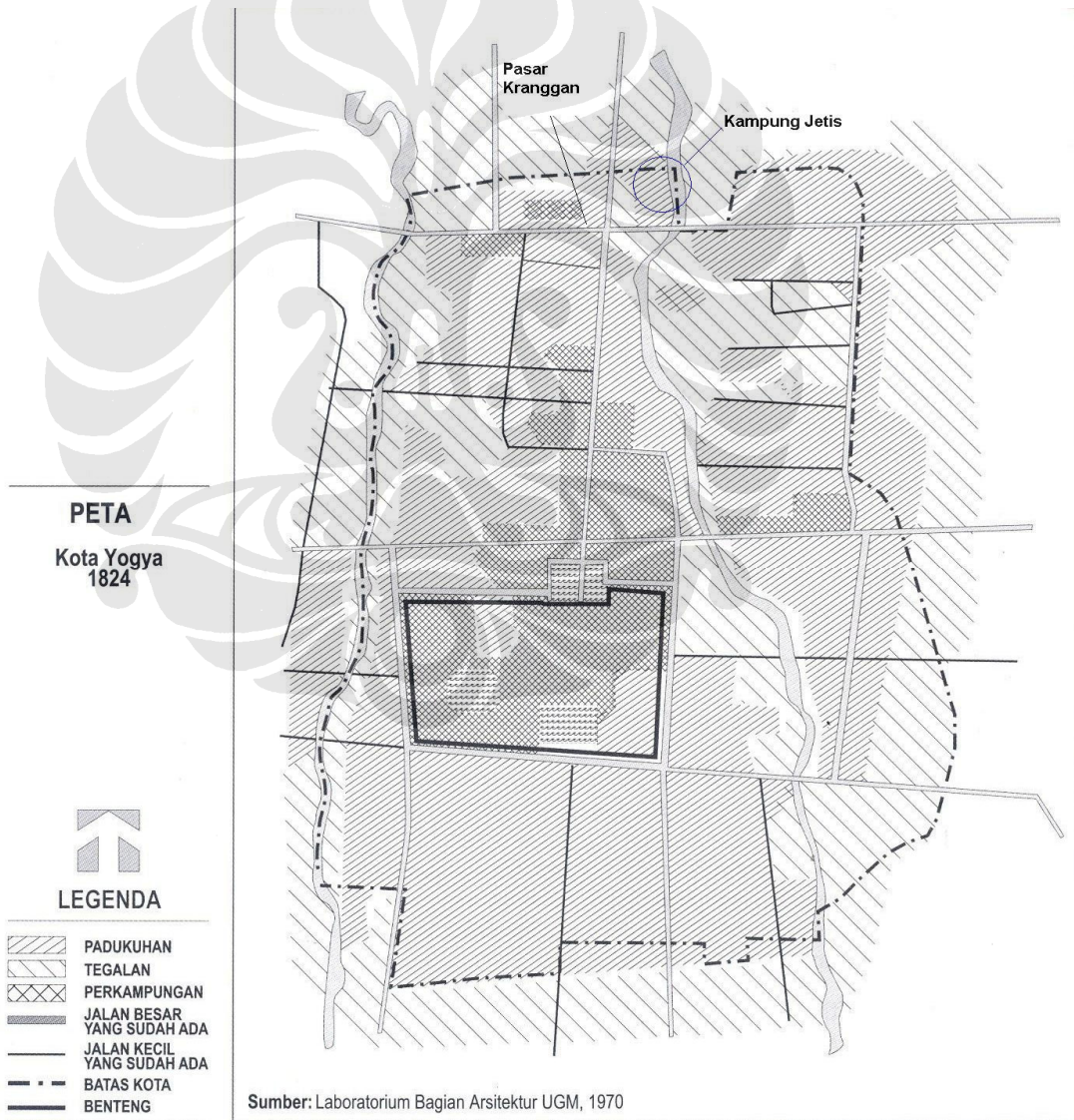
Kampung yang tumbuh di daerah luar benteng atau biasa disebut *Jaban Beteng* adalah tempat tinggal pekerja istana lainnya, termasuk kelompok-kelompok profesional yang bertugas di bidang administrasi pemerintahan, prajurit, tukang, serta pengrajin. Nama-nama kampung itu antara lain Kampung Pajeksan, yaitu tempat tinggal para jaksa; Kampung Gandekan, yaitu tempat tinggal para pesuruh; Kampung Dagen, yaitu tempat tinggal para tukang kayu; Kampung Jlagran, yaitu tempat tinggal para tukang batu. Walaupun berada di luar bangunan benteng mereka adalah penduduk Ibukota Yogyakarta yang pertama yang terkenal dengan *kuthanegara* yang berarti kota istana kerajaan (gambar 1). Kawasan yang berada di luar wilayah disebut sebagai wilayah di luar negara atau *mancanegara*. Sebelah selatan Krapyak dinamakan *kidul negara* sedangkan di sebelah utara bangunan Tugu disebut sebagai *Lor Negara* (Surjomihardjo, 2000).



Gambar 1. Peta Yogya tahun 1756

Sejarah perkembangan Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa bagian utara bangunan Tugu atau pal putih merupakan batas luar dari Ibukota Yogyakarta. Pengembangan kawasan tata kota lebih difokuskan di daerah yang berada di *Jeron Beteng* maupun *Jaban Beteng*. Kawasan Jetisharjo dan sekitarnya yang berada di wilayah *mancanegara* berada di luar perencanaan kota sehingga berkembang secara alami. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan yang muncul terjadi karena wilayah ini menjadi daerah penyangga Ibukota Yogyakarta (Soemardjan, 1981).

Pada tahun 1824 terdapat dua kelompok permukiman di sebelah barat Sungai Code. Kawasan ini sekarang merupakan pasar Kranggan yang menjadi pasar kedua terbesar setelah Pasar Induk Beringharjo di Jalan Malioboro (Gambar 2). Pasar ini merupakan penggerak perekonomian di permukiman baru di tepi Sungai Code. Pada masa itu Kampung Jetisharjo sudah menjadi kawasan dengan aktifitas utama pertanian. Lahan-lahan pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama masyarakatnya berkembang pesat. Perkembangan kawasan ini makin pesat sejak dibangunnya prasarana transportasi baik rel kereta api maupun jalan yang menghubungkan Yogyakarta dengan Semarang dan Surakarta (Suryo, 2002).



Gambar 2. Peta Yogya tahun 1824

Perkembangan Kota Yogyakarta ini juga dipengaruhi oleh pembangunan rel kereta api pada tahun 1872 yang menghubungkan Yogyakarta, Surakarta dan Semarang. Perkembangan transportasi tersebut mendorong kegiatan perdagangan serta menciptakan daya tarik bagi masyarakat di pedesaan maupun kota lain untuk datang ke Kota Yogyakarta. Akibat banyaknya pendatang ini perkembangan penduduk Yogyakarta menjadi sangat beragam baik dari tingkat ekonomi maupun kebudayaannya (Suryantoro, 2002).

Pada tahun 1916 Keraton mengeluarkan aturan tentang penetapan untuk permukiman para pendatang. Kampung-kampung pendatang ditempatkan di daerah-daerah tertentu yang berada di lingkaran paling luar dari Keraton Yogyakarta yaitu *negaragung* dan *mancanegara*. Kampung-kampung ini antara lain adalah Kampung Gowongan, Kampung Gading, Kampung Wirobrajan, Kampung Pengok, Kampung Mergangsan dan Kampung Jetisharjo (Khairuddin, 1995).

Pertumbuhan permukiman yang ada di sepanjang pinggir Sungai Code ini secara umum dapat dibedakan atas dua periode pertumbuhan. Pertama adalah permukiman yang ada sejak berdirinya kota (1756-1792): jaman penjajahan 1793-1942 hingga penjajahan Jepang sampai awal masa kemerdekaan (1942-1965). Kedua adalah pemukiman yang baru tumbuh mulai awal tahun 1970-an baik yang tumbuh di lokasi tanah daratan kosong yang ada di bawah pengelolaan Pemerintah Daerah maupun yang tumbuh di lokasi tanah sempadan sungai yang rawan banjir (Setiawan 1998)

Kotamadya Yogyakarta mempunyai luas wilayah 32,50 km<sup>2</sup>. Terdiri dari 14 kecamatan dan terdiri atas 163 rukun kampung dimana salah satunya adalah Kampung Jetisharjo (Kantor Statistik Kodya Yogyakarta, 1999). Kampung Jetisharjo sebelumnya dikenal dengan nama Kampung Bangun Rejo, yang artinya membangun kemakmuran. Kampung Jetisharjo adalah daerah baru yang mulai didatangi oleh masyarakat untuk mencari kehidupan baru di perkotaan atau di pusat pemerintahan Keraton Yogyakarta.

Kampung Jetisharjo sebagai kampung pribumi yang ditetapkan pihak Keraton juga merupakan tempat tinggal orang "kulit putih", sebutan untuk orang Eropa khususnya bangsa Belanda, yang tidak dapat menempati daerah Kampung Loji Kecil dan Kampung Kota Baru yang sudah penuh. Bukti keberadaan mereka masih dapat dilihat dari peninggalan bangunan bergaya Eropa yang banyak ditemui di ruas Jalan A.M. Sangaji. Beberapa rumah masih terlihat seperti aslinya namun sudah berubah fungsi sebagai perkantoran (Surjomihardjo, 2000).

Proses pembangunan permukiman di sepanjang sempadan sungai berhubungan erat dengan inisiatif dari individu-individu penghuninya. Karakteristik penduduk yang heterogen karena mereka adalah para pendatang, sangat berpengaruh pada perkembangan tersebut. Tekanan untuk hidup di perkotaan dan toleransi antar sesama penghuni mendorong permukiman kota (kampung) tetap berkembang. Latar belakang keragaman akan menciptakan karakter fisik kampung yang lebih dinamis. Permukiman tersebut tergolong permukiman dengan tingkat kepadatan tinggi, kondisi rumah dan lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan, serta mempunyai pola yang tidak teratur karena tidak direncanakan terlebih dahulu (Sumarjan, 1986).

Pertumbuhan permukiman di Yogyakarta terus berkembang dengan berbagai daya tariknya. Salah satunya adalah sebagai kota pelajar. Berkembangnya Universitas Gadjah Mada banyak berpengaruh terhadap perkembangan permukiman ini. Akhirnya perkembangan permukiman mengarah kepada sempadan Sungai Code yang merupakan tanah-tanah kesultanan. Hal ini disebabkan oleh harga tanah di sempadan sungai yang murah karena tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi dari pemerintah. Perpindahan kepemilikan ini tanpa sepengetahuan Keraton sebagai pemilik resmi dari tanah-tanah tersebut. Disisi lain daya tarik ekonomi berperan sebagai penggerak masyarakat pedesaan untuk bermukim di perkotaan. Salah satu daya tarik utama adalah posisi kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan. Sudah sejak lama bahkan sebelum masa kemerdekaan keluarga-keluarga di Kota Yogyakarta menerima pelajar-pelajar dari

daerah lain atau pedesaan di sekitar Yogyakarta untuk belajar (Suryadi dalam Nugroho, 1997).

Pertumbuhan permukiman yang relatif cepat menjadikannya sebagai permukiman yang kumuh. Permukiman seperti ini merupakan permukiman kumuh yang tidak teratur dan tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan. Permukiman kumuh atau yang dikenal juga sebagai *slum* adalah bangunan-bangunan pada suatu wilayah yang memiliki ciri sebagai berikut (Ken Ichi Tanabe, 1969 dalam Cahyono 2001.):

- Mempunyai kenampakan penduduk yang padat
- Standar tempat tinggal yang rendah; bangunan-bangunannya memiliki kondisi sebagai berikut: (1). lahan bangunan yang jelek; (2). mempunyai ventilasi yang sedikit; (3). mempunyai ruang yang sempit; (4). mempunyai jendela dan pintu yang kecil.

*Slum* terdiri atas rumah-rumah atau bangunan yang berderet tanpa fasilitas yang memadai dan merupakan gambaran dari kemiskinan. Ada *slum* yang belum terbentuk, tetapi ada juga yang tumbuh dari perkampungan yang ada. Tempat yang sebelumnya masih layak sebagai tempat tinggal lambat laun menjadi padat, sehingga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kehidupan sosial. Kategori-kategori yang memudahkan untuk mengenali sebuah permukiman itu kumuh atau tidak adalah sebagai berikut (Cahyono, 2001):

1. Langka prasarana/sarana dasar
2. Seringkali tidak terdapat jaringan jalan lokal (umumnya jarak kawasan permukiman ke jalan lingkungan lebih dari 100 meter.
3. Saluran pembuangan atau pemasukan yang ada tidak berfungsi, terjadi genangan air lebih dari 3 jam saat hujan.
4. Kualitas air bersih rendah dengan tingkat konsumsi air kurang dari 30 liter /orang /hari.
5. Sering terjadi pencemaran lingkungan dan wabah penyakit (endemi) karena sistem pembuangan air limbah dan sampah tidak berfungsi atau tidak tersedia.

6. Kepadatan nyata diatas 500 jiwa /ha untuk kota besar dan sedang dan diatas 750 jiwa/ha untuk kota metropolitan, kepadatan bangunan diatas 100 unit/Ha dan penggunaan lahan kurang dari 9m<sup>2</sup>/orang.

Pengertian tentang perkampungan kumuh ini tidak saja secara fisik tetapi merupakan suatu keterkaitan yang sangat luas baik dari sisi lingkungan alam, lingkungan binaan dan lingkungan sosial yang ada. Permukiman kumuh memiliki tiga ciri dominan penduduk permukiman kumuh, yakni “perilaku menyimpang”, “budaya permukiman kumuh” dan “apatisme dan keterasingan sosial”. Permukiman kumuh adalah gejala perpindahan penduduk dari desa ke kota yang secara sosial, ekonomi, budaya dan politik tidak berintegrasi dengan kehidupan masyarakat kota. Secara sosial mereka tetap memiliki organisasi dan kohesi kelompok hanya saja mereka tidak mau kembali ke desanya karena tidak ada harapan hidup lagi di sana. Mereka ingin ikut memanfaatkan prasarana pelayanan dan kelembagaan yang ada di kota (Clinard, 1970).

### **2. 1. 3. Gerakan Permukiman Romo Mangun**

Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 1984 merencanakan program untuk membersihkan sempadan Sungai Code dari berbagai bangunan permukiman dan mengubahnya menjadi sabuk hijau dengan alasan utama menyelamatkan penduduk dari bahaya banjir dan memperindah kota dengan taman. Pada bulan April 1986 pemerintah melakukan penggusuran permukiman sepanjang Sungai Code. Romo Mangun sebagai seorang agamawan dan budayawan yang terkemuka di Yogyakarta melakukan perlawanan bersama dengan beberapa orang dengan menulis di berbagai media cetak. Romo Mangun sendiri bahkan melakukan aksi mogok makan sebagai upaya membela masyarakat *pinggir* Sungai Code. Selain itu usaha pendampingan juga dilakukan kepada masyarakat untuk memperbaiki lingkungan dan juga permukiman kumuh yang ada (Khudori, 2002).

Komunitas masyarakat yang dibela Romo Mangun adalah para pemulung, penarik becak dan pengamen. Mereka hidup dalam ketidakpastian dan tanpa sistem pengamanan

serta status kependudukan yang tidak jelas. Pemukiman Ledhok Gondolayu merupakan kampung kumuh yang ditandai dengan gubug-gubug dari karton dan barang bekas lainnya. Mereka mulai masuk ke kawasan ini pada tahun 1970-an yang selalu mengalami penggusuran dari pemerintah kota Yogyakarta karena dianggap sebagai penghuni liar.

Penanganan yang dilakukan oleh Romo Mangun dibagi menjadi dua yaitu aspek fisik dan aspek manusia. Aspek fisik yang dilakukan adalah menata kawasan yang semula kumuh dan tidak layak huni menjadi kawasan yang tertata, teratur dan layak huni. Rumah-rumah diatur sedemikian rupa dan secara arsitektural mempunyai nilai keindahan yang selama ini jauh dari citra yang ditampilkan masyarakat sempadan Sungai Code. Program yang dikembangkan adalah Tribina yaitu Bina Manusia; Bina Usaha dan Bina Lingkungan. Bina Manusia adalah peningkatan pengetahuan, pengertian, dan kesadaran berkeluarga dan bermasyarakat. Bina Usaha adalah peningkatan taraf hidup dan sarana ekonomi masyarakat. Bina Lingkungan untuk perbaikan lingkungan hidup khususnya di bidang perumahan dan fasilitas umum. (Wahyuni 1984).

Keberhasilan gerakan Romo Mangun adalah merubah citra permukiman kaum miskin dan yang terpinggirkan tidak selamanya kotor dan jelek tetapi juga bisa mempunyai citra bangunan yang bisa tampil indah, bersih dan mempunyai martabat apabila ditangani dengan kesungguhan. Kampung Ledok Gondolayu binaan Romo Mangun melakukan perbaikan lingkungan dan menjaga kebersihan permukiman. Selain itu ada satu perjuangan yang penting yaitu pengakuan masyarakat di sempadan ini sebagai penduduk yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mereka peroleh dari Kelurahan Terban. Pada tanggal 7 Agustus 1983 Ledhok Gondolayu diakui secara syah oleh Walikota Yogyakarta sebagai bagian dari RT 127 Kelurahan Terban (Khudori 2002).



Gerakan ini dapat digolongkan sebagai gerakan kebudayaan karena melihat masalah Code sebagai masalah pandangan hidup dan sistem nilai masyarakat miskin. Hal ini menyebabkan gerakan perlawanan penindasan kaum elit terhadap kaum miskin. Akan tetapi gerakan romo Mangun sendiri seperti yang ditulis oleh Khudori menyatakan bahwa Gerakan romo Mangun adalah gerakan yang diprakarsai oleh golongan elit (rohaniwan, cendekiawan, dan mahasiswa) untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, khususnya kaum miskin kota. Kegiatan ini tidak bisa disebut sebagai gerakan rakyat karena gerakan ini memang tidak muncul dari rakyat banyak. Rakyat yang diperjuangkan tidak terlibat sepenuhnya dalam proses kegiatan (Khudori 2002).

Persoalan yang selama ini belum banyak disentuh oleh gerakan Romo Mangun adalah keterikatan masyarakat dengan Sungai Code. Program Bina Lingkungan yang ada lebih banyak melakukan perbaikan permukiman dan sarana dan prasarana fisik serta keindahan. Hal ini dikemukakan oleh Wardhani bahwa keberadaan permukiman masih bisa diterima tetapi masih harus ada keselarasan (Wardhani, 2001). Keselarasan dengan lingkungan ini yang tidak banyak dibahas dalam Romo Mangun untuk mampu menggerakkan masyarakat ikut menjaga kebersihan sungai. Masyarakat Ledhok Gondolayu adalah kumpulan orang yang tinggal dalam satu ruang yang sama tanpa ada aturan dan keterikatan antar anggota juga dengan Sungai Code dan sempadannya sebelum kedatangan Romo Mangun (Khudori 2002).

Gerakan ini merupakan gerakan yang positif sebagai keberpihakan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak baik dari sisi manusia, ekonomi dan lingkungan yang dalam hal ini adalah kebersihan dan keindahan. Gerakan oleh Romo Mangun sendiri ini, sesungguhnya hanya berjalan selama tiga tahun yaitu tahun 1983 sampai dengan 1986 dan diteruskan oleh ada penerusnya. Romo Mangun sadar bahwa rumah di sempadan ini tidaklah terlalu tepat apabila dilihat secara berkelanjutan sehingga dibuat peraturan bahwa rumah tidak menjadi milik pribadi serta tidak boleh diperjual-belikan (Khudori 2002). Sisi negatif dari gerakan ini adalah adanya

pemahaman masyarakat di sempadan Sungai Code lainnya yang mendapatkan sebuah pola untuk dapat lebih memanfaatkan sempadan sungai untuk permukiman.

#### **2.1.4. Proses Kebudayaan**

Kebudayaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Dalam pemikiran ini hanya sedikit tindakan manusia yang dilakukan tanpa belajar yaitu yang bersifat naluriah seperti gerakan reflek. Kegiatan manusia seperti makan dan minum adalah kebiasaan yang ditanamkan sejak kecil dengan cara belajar, begitu pula dengan cara manusia memperlakukan sisa dari proses produksi dan daur hidup mereka yaitu sampah (Koentjaraningrat, 1990).

Gagasan, konsepsi dan nilai-nilai memuat pengertian kebudayaan. Kebudayaan membentuk persespi. Kebudayaan menjadi pedoman tingkah laku serta kerangka penerjemahan atas tindakan tersebut. Kebudayaan membuat kita berpikir guna memahami hidup dan karena itu mampu menempatkan diri dalam struktur *logis* yang penuh makna. Berbudaya berarti meninggalkan kekacauan dan menciptakan keteraturan (Geertz, 1992).

Satuan kelompok orang yang memiliki gagasan, konsepsi dan nilai mempunyai keterikatan fungsional dan sekaligus keterikatan makna-logika. Keterikatan fungsional adalah keterikatan satu sama lain oleh fungsi-fungsi yang diatur dari satu kekuatan pusat yang mampu menggerakkan anggotanya. Makna dan logika adalah keterikatan alam pikiran yang sama atau kurang lebih sama karena berorientasi pada suatu makna yang sama. Kelompok ini secara sosial terus menyesuaikan dirinya dengan perubahan alam dan sosial yang terus berubah secara kompleks (Geertz, 1992).

Hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan sekitarnya dipengaruhi oleh budaya yang berkembang di masyarakat. Faktor budaya sangat penting bagi manusia untuk melakukan proses adaptasi dengan lingkungan. Manusia merupakan bagian dari

sistem sosial yang di dalamnya mencakup nilai, norma, ideologi, pengetahuan, teknologi, organisasi sosial, serta pola adaptasi dan eksploitasi sebagai hasil dari proses pemaknaan dengan lingkungan sekitarnya. Proses manusia memahami lingkungannya dan melakukan kegiatan sehari-hari melalui kebiasaan, pola-pola perilaku dan tata nilai tertentu inilah yang disebut kebudayaan (Ahimsa-Putra, 2003).

Setiap komunitas memiliki sumberdaya yang terbatas untuk menanggulangi tuntutan perubahan sosial dan lingkungan yang sifatnya bervariasi menurut waktu, kuantitas dan kualitasnya. Perubahan sistem pengelolaan sampah dan sempadan sungai memerlukan proses integrasi ke dalam sistem sosial masyarakat. Hubungan ini seringkali mengakibatkan tuntutan penyesuaian tersebut melebihi sumberdaya yang tersedia dalam sistem sosial.

Tidak adanya aturan yang jelas mengenai pengelolaan sungai memunculkan persoalan yang besar bagi warga yang tinggal di sempadan Sungai Code. Kondisi seperti itu memerlukan adaptasi dengan persoalan sungai yang beragam, dari banjir, kekeringan, sampai kualitas air. Dengan demikian proses adaptasi bukan hanya sekedar persoalan bagaimana mendapatkan makanan dari suatu kawasan tertentu tetapi juga mencakup persoalan transformasi sumber-sumber daya lokal dengan mengikuti model dan standar konsumsi manusia yang umum. Lebih lanjut lagi strategi beradaptasi diartikan sebagai pola-pola yang dibentuk oleh berbagai usaha yang direncanakan sehingga dapat memenuhi syarat minimal yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang langsung dihadapi (Ahimsa-Putra, 2003). Pola-pola tersebut dapat dibedakan menjadi 'pola bagi' (*pattern for*) dan 'pola dari' (*pattern of*). Pola dari dalam hal ini adalah uraian atau gambaran yang selalu berulang kembali dalam bentuk yang kurang lebih sama. Pola semacam ini mengenai kegiatan keagamaan, kegiatan ekonomi, kegiatan kekeluargaan (Ahimsa-Putra 2003), dan termasuk kegiatan "Merti Code". Kegiatan ini dilakukan dengan bimbingan atau petunjuk dari pandangan hidup, nilai-nilai, norma-norma serta berbagai aturan. Sistem petunjuk, sistem pembimbing inilah yang dikatakan sebagai

'pola bagi', yang seringkali juga disebut sebagai kebudayaan atau sistem budaya (Goodenough, 1964).

Perilaku adaptasi meliputi pemecahan masalah (*problem solving*) dan pengambilan keputusan (*decision making*) (Bennet, 1969). "Merti Code" adalah usaha masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai ideal hubungan antara manusia dengan sungai yang menempati pola bagi atau pola ideal. Sedangkan tindakan aktual yang dilakukan masyarakat adalah suatu proses pengambilan keputusan untuk melakukan suatu tindakan atau untuk tidak melakukannya. Dengan demikian yang penting dalam penelitian ini adalah proses-proses yang terjadi dalam masyarakat baik secara kelompok maupun individu yang memperlihatkan mereka berpartisipasi aktif atau tidak dalam upaya menjaga Sungai Code. Keputusan-keputusan ini berdasarkan pada berbagai pertimbangan, baik yang bersifat fisik maupun berupa nilai dan mekanisme sosial tertentu dan juga faktor-faktor ekonomi. Pola-pola yang tumbuh dan berkembang di masyarakat tersebut muncul dalam bentuk kegiatan budaya yang didalamnya terdapat upacara adat seperti *ruwatan* air, dan kirab.

Upacara adat di sini adalah upacara yang dilakukan secara berulang dengan nuansa religius. Istilah religius itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *religio* yang berarti "kesalehan" dan *religare* yang berarti "mengikat kebersamaan". Artinya, isi atau muatan ajaran dan praktek ajaran tersebut bertujuan untuk menciptakan kesalehan hidup dan rasa keterikatan diantara pengikutnya dalam sebuah komunitas yang mempunyai kesamaan dalam pandangan hidup, cara berperilaku maupun faham yang dikembangkan dalam memahami sesuatu (Geertz, 1983).

Upacara adat disebut juga upacara turun temurun yang bernuansa religi, namun dalam upacara adat terdapat proses penyesuaian dengan budaya lain yang bersinggungan pada waktu. Proses asimilasi dan akulturasi antar budaya akan terjadi sehingga bentuknya berubah. Perkembangan kuatnya nilai-nilai yang disampaikan dan dimaknai oleh masyarakat dalam upacara adat banyak dipengaruhi pula oleh sikap yang diambil oleh

lembaga tetua adat. Lembaga tetua adat ini anggotanya terutama berasal dari keturunan cikal bakal komunitas setempat yang dapat dilihat dari makam yang dikeramatkan oleh penduduk tersebut. Untuk menetapkan keanggotaan tersebut ada yang dilacak lewat silsilah keluarga, namun ada juga berdasarkan pada legenda suatu daerah. Dalam perkembangan lembaga ini dibentuk secara khusus, seperti sebuah organisasi atau kepanitiaan. Lembaga tetua adat ini kemudian amat diperlukan dalam kaitannya dengan keberlangsungan upacara adat (Damami, 2002).

Proses saling mempengaruhi pasti akan terjadi dalam sebuah religi. Proses tersebut mengakibatkan ajaran religi yang lebih kuat dan akan berpengaruh lebih besar terhadap ajaran religi yang “lebih lemah”. Inilah sebabnya upacara adat yang religius senantiasa mengalami pergeseran secara terus-menerus sehingga sulit untuk menentukan upacara adat yang paling asli. Apalagi seringkali religi berakar pada cerita turun-temurun yang mengakibatkan tingkat pergeseran tersebut menjadi semakin melebar. Akibatnya versi religi setempat dan upacara adat yang dihasilkannya menjadi beragam sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Hal ini pula yang menyebabkan berbagai upacara adat punah atau tidak dipraktikkan lagi oleh masyarakat karena perubahan sosial dari masyarakat itu sendiri (Herusatoto, 1987).

Seiring dengan perkembangan sejarah, agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam, Kristen-Protestan, Kristen-Katolik, Konghucu pada akhirnya lebih mendominasi pemaknaan terhadap hubungan antara Tuhan dan alam dibandingkan dengan pengaruh religi dan upacara adat setempat. Agama besar dunia menguasai wilayah “pusat” (menjadi tradisi besar), sedangkan religi dan upacara adat setempat bergeser di daerah pinggiran (tradisi kecil). Makin membengkaknya pengaruh agama-agama besar sukar dibendung. Dalam posisi seperti itu religi dan upacara setempat akhirnya hanya menjadi “kekayaan budaya” saja (Damami, 2002).

Pemahaman makna religi dan upacara adat memerlukan pemahaman mengenai simbol. Simbol-simbol tertentu mempunyai makna yang ingin disampaikan kepada masyarakat.

Masyarakat purba dahulu ketika memahami gejala alam menyikapinya dengan rasa takut (misalnya terhadap peristiwa: letusan gunung berapi, banjir, badai, wabah penyakit, kekeringan, kelaparan, dan sebagainya). Berbagai perasaan takut, kagum dan heran tersebut dimunculkan dalam berbagai wujud simbolik seperti “pemujaan” dan juga “penghindaran” yang terekam dalam upacara adat (Geertz 1989).

Masyarakat Yogyakarta mempunyai dua kutub yang ditakuti yaitu Gunung Merapi dan Laut Selatan. Pemujaan dilakukan untuk menghindari semua bencana yang dapat ditimbulkan oleh kedua unsur alam tersebut. Upacara adat yang ada dalam perkembangannya mengalami berbagai pergeseran karena berbagai pengaruh, tetapi acuannya sering berupa cerita turun-temurun, maka tidak ada bentuk bakunya untuk memahami makna simbolik yang termuat dalam religi atau upacara adat tersebut. Hal ini sangat mungkin terjadi karena upacara adat ini masih banyak yang berbentuk budaya lisan dan bukan budaya tertulis yang ada di Keraton Yogyakarta. Karena itu menjadi terbuka lebar bagi orang untuk memahami makna simbolik yang ada di dalamnya (Khairuddin, 1989).

Dalam agama-agama besar dunia dalam memahami apa yang disebut “Tuhan”: juga memunculkan sikap kagum dan memuja. Namun arah kekaguman dan kecenderungan memuja tersebut ditampilkan dalam wujud sikap rasa syukur (sikap berterimakasih). Apalagi dalam agama-agama besar dunia tersebut memang ditekankan faktor pemahaman berdasar penalaran sejauh kemampuan akal manusia. Dengan demikian para penganut agama besar dunia dalam bersikap kagum dan memuja berdasarkan pada kesadaran “tahu”, berdasarkan pengetahuan, bukan serba misteri. Konsep “rasa syukur” inilah yang berdialog dengan konsep “rasa takut” yang muncul dalam upacara adat (Geertz 1989).

Sempadan sungai dan manusia yang bermukim di atasnya merupakan bagian dari ekosistem sungai. Komponen membentuk suatu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara keduanya. Pola perilaku dan cara memandang dunia juga

dipengaruhi oleh keberadaan sungai dalam kehidupan sehari-harinya. Sungai sebagai bagian sehari-hari akan dimaknai sesuai dengan fungsi dan apa saja yang tertangkap oleh logika manusia untuk menggambarkan makna sungai. Makna tentang sungai ini yang akan menentukan bagaimana manusia mengelola lingkungan dan memanfaatkan sungainya (Triharso 1983).

Permukiman di sempadan Sungai Code bukan merupakan pengelompokan yang berlandaskan kekerabatan, marga, suku atau klan tetapi karena mobilitas yang tinggi dari para pendatang sehingga kesatuan sosial yang terbentuk adalah yang dilandasi oleh persamaan wilayah permukiman. Lingkungan Permukiman inilah yang membentuk kesatuan-kesatuan sosial. Di sisi lain kesatuan geografik, kebudayaan, politik maupun kekerabatan bukan merupakan suatu batas lagi.

Terbentuknya kesatuan-kesatuan sosial berdasar persamaan lokasi permukiman dapat dimengerti karena fungsi-fungsi sosial yang hampir sama seperti tempat berlindung, sumber mata pencaharian dan khususnya sungai sebagai penyedia air bagi permukiman di sempadan sungai. Pengelolaan lingkungan muncul karena banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan fisik sungai. Perubahan-perubahan ini menyebabkan masyarakat tidak dapat lagi menjalankan pola hidup lama karena daya dukung lingkungan sungai sudah berubah dan tidak memungkinkan lagi sampah tidak dikelola karena tidak ada lahan lagi untuk menimbunnya. Perubahan-perubahan ini merupakan komponen-komponen lingkungan hidup yang saling berkaitan.

Secara Skematis komponen yang saling berkaitan tersebut terdiri dari tiga aspek yaitu aspek alam, aspek sosial dan aspek lingkungan binaan. Ketiga kategori ini tidak dapat dipisahkan tetapi merupakan suatu kesatuan, karena ketiganya merupakan kesatuan integral yang disebut ekosistem (Soetaryono, 2000). Konsep ekosistem inilah yang dipakai peneliti untuk melihat persoalan lingkungan di kawasan permukiman Sungai Code Utara. Permasalahan-permasalahan lingkungan tidak bisa dipisahkan dengan

persoalan-persoalan sosial yang ada dan juga wilayah permukiman yang merupakan menjadi lingkungan buatan manusia.

Kesinambungan kehidupan tercipta karena keberhasilan interaksi manusia dengan lingkungan alami seperti memanfaatkan sumberdaya air untuk kehidupan, merubah lingkungan alam untuk memudahkan manusia membangun sistem pertanian dan kemudahan lainnya. Persoalan yang muncul adalah bagaimana hubungan antara lingkungan permukiman (buatan manusia) dengan lingkungan alam yang berubah karena adanya tekanan dari manusia. Hal ini tidak bisa dilepaskan hubungan antar manusia di dalamnya dengan membentul lembaga dan pranata sosial. Kemampuan masyarakat untuk memulihkan dirinya setelah mengalami berbagai persoalan lingkungan merupakan kajian penting yang dilakukan oleh peneliti.

Pola-pola pemanfaatan dan pengaturan dalam masyarakat diatur oleh nilai-nilai dan norma tertentu yang selalu dikaitkan dengan konsep manusia tentang alam atau hubungannya dengan alam. Kegiatan manusia sehari-hari tidak sekedar diarahkan oleh nilai-nilai yang diciptakan untuk keteraturan itu tetapi manusia juga mengembangkan pola-pola ideal melalui berbagai media yang sering disebut dengan reproduksi kebudayaan. Proses ini berupa pola-pola ideal yang merupakan pemaknaan manusia terhadap lingkungan sungai melalui simbol-simbol tertentu. Simbol-simbol ini dikomunikasikan kepada masyarakat melalui upacara dan ritual-ritual ada yang difahami oleh masyarakat dari kebudayaan besar yang ada di lingkungan sekitarnya.

## **2.2. Kerangka Pikir**

Sungai dan lingkungan alam sekitarnya telah menjadi tempat yang sangat mendukung fungsi kehidupan. Pertumbuhan manusia dan kebudayaan juga ditentukan salah satunya oleh ketersediaan air yaitu sungai yang juga berfungsi sebagai penopang kehidupan. Sempadan sungai yang subur dan ketersediaan air yang cukup telah menarik manusia untuk bermukim dan mengembangkan keterampilan dan mata pencaharian. Daya



dukung lingkungan yang tinggi menyebabkan wilayah sekitar sungai dapat berkembang pesat dan menarik banyak manusia untuk tinggal tidak jauh dari sungai.

Fungsi sungai sebagai penopang kehidupan manusia juga membentuk pemahaman manusia tentang makna sungai dilekatkan pada simbol-simbol tertentu yang menandakan situasi di sungai atau fenomena-fenomena alam yang terjadi di sungai. Makna ini mempengaruhi kegiatan dan perilaku yang dihasilkan manusia sehari-hari terutama yang berkenaan dengan pemanfaatan sungai dan pengelolaannya. Perubahan lingkungan dan sosial serta fungsi sungai karena kepadatan penduduk dan berbagai pembangunan juga merubah fungsi sungai. Perubahan ini mempunyai pengaruh terhadap makna hubungan manusia dengan lingkungan sungai. Kehilangan sebagian fungsi dari sungai terhadap kehidupan manusia yang bermukim di sempadan menyebabkan keterasingan masyarakat terhadap sungai.

Perubahan ini membuat masyarakat memiliki pilihan yaitu untuk tidak memikirkan bagaimana keadaan sungainya yang semakin kotor atau kemudian mau memikirkannya dan mencoba untuk melakukan pengelolaan lingkungan. Praktek-praktek perbaikan lingkungan dan perbaikan kawasan bantaran sungai tidak muncul begitu saja tetapi melalui proses kesadaran bahwa sungai masih mampu menjadi penopang kehidupan. Kesadaran lingkungan juga menggerakkan mereka untuk mencoba mengelola dan menjaga sungai dari perusakan yang lebih parah.

Merti Code sebagai kegiatan budaya adalah sebuah upaya untuk mengkomunikasikan nilai-nilai yang sudah mulai dilupakan. Merti Code merupakan sebuah siasat budaya mengingatkan kembali makna sungai yang pudar karena perubahan fungsi yang terjadi. Perubahan fisik dan fungsi sungai tidak serta merta menghilangkan budaya dan pola yang sudah tercipta sebelumnya. Ingatan-ingatan budaya dan fungsi budaya sebagai media komunikasi ke dalam maupun keluar dari komunitas adalah salah satu unsur

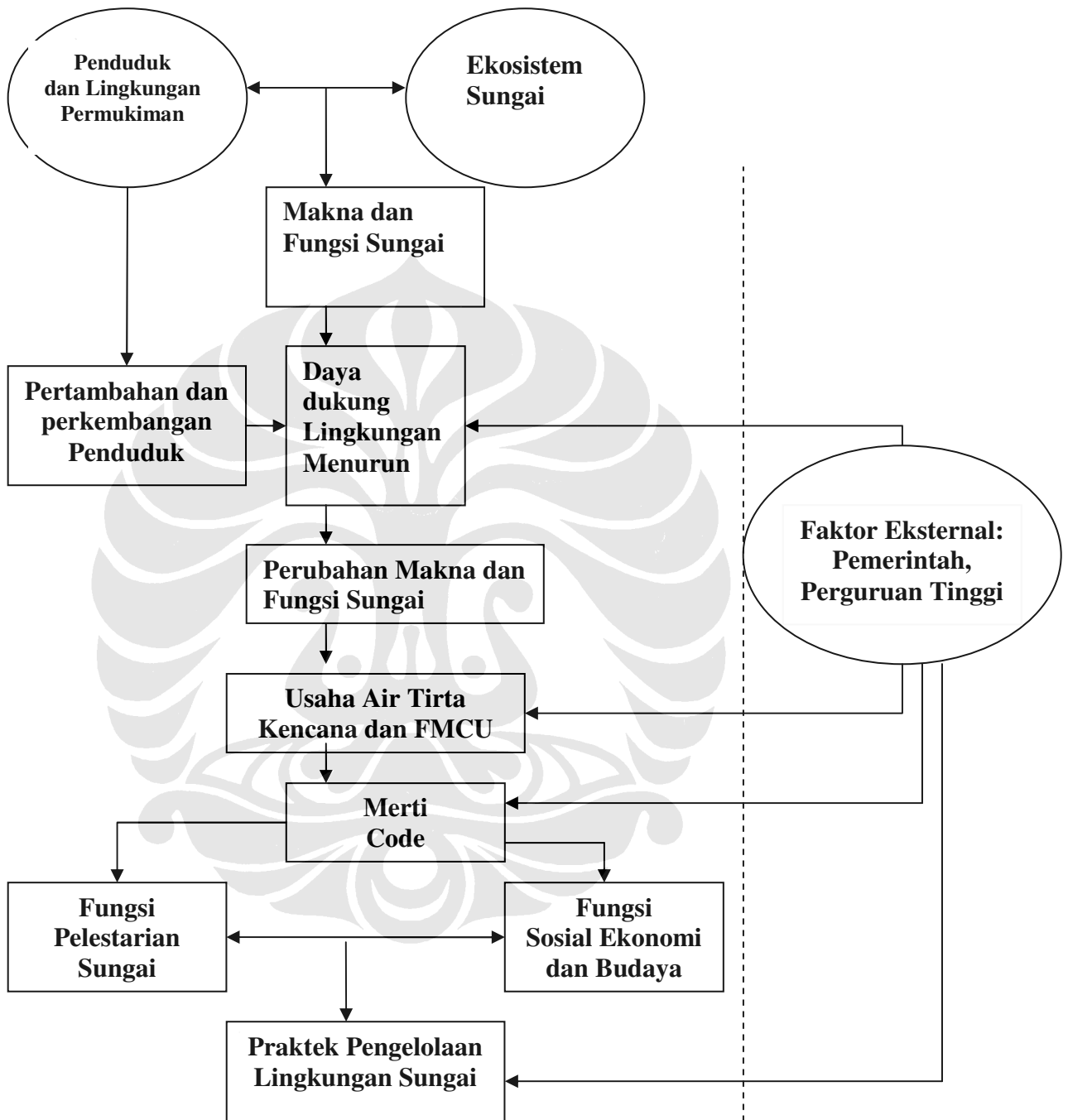
penggerak bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan memaknai kembali makna sungai dan praktek-praktek pengelolaan lingkungan yang harus dijalankan.

### **2.3. Kerangka Konsep**

Penduduk dan lingkungan permukiman mempunyai hubungan timbal balik dengan ekosistem sungai. Hubungan timbal balik ini memunculkan makna dan fungsi sungai bagi masyarakat. Penduduk dan lingkungan permukiman mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan ini menyebabkan daya dukung lingkungan menurun. Penurunan daya dukung lingkungan juga mempengaruhi perubahan makna dan fungsi sungai terhadap penduduk.

Pemerintah, Perguruan Tinggi dan LSM menyusun program-program untuk memperbaiki kualitas lingkungan di Sungai Code yang mulai menurun. Kegiatan yang juga dikenal dengan Tribina dilakukan oleh pemerintah yang tidak saja menyentuh perbaikan fisik sungai tetapi juga melakukan pemberdayaan masyarakat yang lebih banyak dilakukan oleh Perguruan tinggi dan LSM. Program-program ini yang berpengaruh mendorong munculnya berbagai kegiatan di Kawasan Code Utara seperti perbaikan lingkungan fisik sampai kepada penguatan kelembagaan.

Masyarakat membentuk Usaha Air Tirta Kencana untuk mengatasi perubahan fungsi sungai. Program Tirta Kencana ini mendapat pengaruh dan dukungan dari berbagai pihak. Pengembangan Tirta Kencana secara bersamaan juga mendorong masyarakat untuk membentuk lembaga masyarakat yang bernama Forum Masyarakat Code Utara (FMCU). Lembaga inilah mengembangkan *Merti Code*. *Merti Code* adalah kegiatan budaya masyarakat untuk mendorong fungsi pelestarian lingkungan dan fungsi sosial ekonomi. Kedua fungsi ini menjadi pendorong praktek pengelolaan lingkungan dengan partisipasi aktif dari masyarakat.



Gambar 3. Kerangka Konsep Penelitian

